

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**

EKO SETIAWAN

e-mail : eko_setiawan8908@gmail.com

HP : 082172410317

Anggota :

Dr. ANDREAS, MM, Ak

Drs. RUSLI, MM, Ak

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Abstract

The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the effects of partial and simultaneous clarity budgetary targets, accounting controls and reporting systems for accountability of government performance of Pelalawan Local Government.

Population and sample of the study was the head of department / agency / office and head section / sub section on education in finance on 30 SKPD Pelalawan Data collected by distributing questionnaires to heads of 60 departments / agencies / offices and the head section / subsection finance . Data processing is done by using multiple regression analysis .

The results show that the budget goal clarity and accounting controls a significant effect on performance accountability of government agencies , while reporting system does not affect the performance accountability of government agencies . The magnitude of the effect of independent variables on the dependent variable is equal to 96.4 % . 3.6 % means there are other variables that affect the dependent variable .

Keywords : Budget Goal Clarity , Control Accounting , Reporting Systems , Performance Accountability .

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggung jawabnya.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Azlina, 2011).

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dari LKPD Kabupaten Pelalawan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan *Sistem Pengendalian* dan *ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan* (Siaran PERS, BPK RI perwakilan provinsi Riau).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diangkat sebagai permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan”**.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian akuntansi efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan memberikan kontribusi informasi serta landasan penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas kinerja instansi.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Konsep Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran (*budget*) pada dasarnya berbeda dengan ramalan (*forecast*). Hansen dan Mowen (2004) mendefinisikan anggaran atau budget sebagai rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Menurut Narafin (2004) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2010).

2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006).

Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

4. Pengendalian Akuntansi

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

5. Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo (2009). "Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran *financial* dan *non financial*".

2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1. Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Munawar (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh

orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran.

Ketidajelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

H₁: Terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

2. Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hansen dan Mowen (2004) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan (Indudewi, 2008).

H₂: Terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

3. Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010).

Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. LAN dan BPKB (2000) dalam Indudewi (2008) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan.

H₃: Terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan SKPD dan kabag. SKPD pemerintah Kabupaten Pelalawan, populasi tersebut juga dijadikan sampel dalam penelitian ini, karena masing-masing SKPD tersebut melakukan proses penyusunan anggaran untuk dinas-dinas mereka sendiri.

Responden dalam penelitian ini kepala/pimpinan dinas/SKPD dan Kabag.Keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berhubungan dengan persepsi atau opini responden mengenai variabel yang diteliti dan data yang berhubungan dengan karakteristik responden. Data primer merupakan salah satu teknik pengambilan data secara langsung dengan menggunakan media kuesioner dengan cara penyampaian kuesioner secara langsung kepada responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala/pimpinan dinas/SKPD dan Kabag.Keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini merupakan *cross section* data yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuisisioner secara langsung kepada setiap responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang ikut serta dalam penyusunan anggaran pada setiap SKPD pemerintah kabupaten Pelalawan.

Pengiriman kuisisioner dilakukan secara langsung kepada responden, karena metode ini memiliki keunggulan, diantaranya peneliti dapat langsung bertatap muka dan melakukan wawancara sehingga dapat meyakinkan responden tentang keseriusan penelitian ini. Selain itu dengan metode ini peneliti bisa mengurangi kemungkinan kuisisioner dijawab oleh responden yang tidak tepat. Kuisisioner yang akan disebar dalam penelitian ini sebanyak 60 buah dengan rincian masing-masing SKPD akan memperoleh 2 buah kuisisioner yang akan diberikan untuk kepala/pimpinan SKPD dan kabag.Keuangan. Kuisisioner akan diambil pada waktu yang telah disepakati oleh peneliti dan responden.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty,2011). Variabel ini diukur menggunakan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5). Indikator dari variabel ini adalah pusat tanggung jawab, perencanaan, bidang kegiatan, produk, dan tingkat pengembalian.

2. Pengendalian Akuntansi

Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan yang digunakan (Herawaty,2011). Indikator dalam variabel ini adalah pusat kegiatan, ruang lingkup, maksud, sifat struktur, sifat informasi, orang yang terlibat, sumber ilmu, dan lingkup waktu. Skala variabel diukur dengan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

3. Sistem Pelaporan

Variabel sistem pelaporan diukur dengan indikator penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi. Variabel ini terdiri dari 4 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty,2011), dimana variabel ini menggunakan 5 skala point. Skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

4. Akuntabilitas Publik

Variabel akuntabilitas public diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty,2011). Indikator variabel ini adalah akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Skala yang digunakan 5 skala point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Metode regresi berganda

yaitu metode statistik untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pelalawan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja Pemda

α : Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi

X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran

X2 : Pengendalian Akuntansi

X3 : Sistem Pelaporan

e : Error

3.6 Pengujian Kualitas Data

a. Uji Kualitas Data

Pengujian awal yang peneliti lakukan untuk penelitian ini adalah uji kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Ghozali, 2002).

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki *cronbach alpha* $\geq 0,6$ (Sekaran, 2007).

b. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2002).

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya problem autokorelasi ini maka dapat melakukan uji Durbin-Watson (*DW test*) yaitu dengan membandingkan nilai DW statistik dengan DW tabel. Apabila nilai DW statistik terletak pada daerah *no autocorrelation* berarti telah memenuhi asumsi klasik regresi. (Ghozali, 2002).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya

multikolinearitas ini adalah kesalahan standar penaksiran semakin besar. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan mengamati:

- a. Besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan toleransi, model dikatakan bebas multikolinearitas jika VIF disekitar angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* yang mendekati 1.
- b. Besaran korelasi antar variabel bebas, jika korelasi antar variabel bebas lemah (di bawah 0,5) maka dikatakan bebas multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Sekaran, 2007). Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian model. Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Regression*), kemudian dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dilakukan dengan pengujian variabel secara parsial (uji t). Untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien determinan (R^2). Kedua pengujian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian statistik uji t.

Pengujian tersebut dilakukan dengan dua arah (two tails) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansinya ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k, apabila thitung > ttabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika thitung < ttabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kepala/Pimpinan Dinas/SKPD dan Kabag. Keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pendistribusian kuesioner kepada responden dilakukan dengan cara mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung ke responden.

4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemda disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	42	29	40	35.26	3.703
X2	42	19	25	22.48	2.086
X3	42	13	20	18.19	1.565
Y	42	30	39	35.00	3.131
Valid N (listwise)	42				

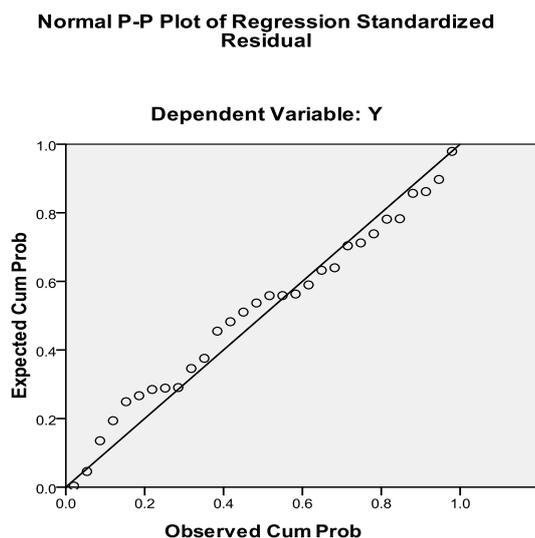
Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini, pengujian normalitasnya dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2002).

Gambar 4.1
Hasil Uji Normal Probability Plot



Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghozali (2002), VIF merupakan kebalikan dari *tolerance* jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{tolerance}$). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai $tolerance < 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.581	1.721
X2	.213	4.688
X3	.169	5.927

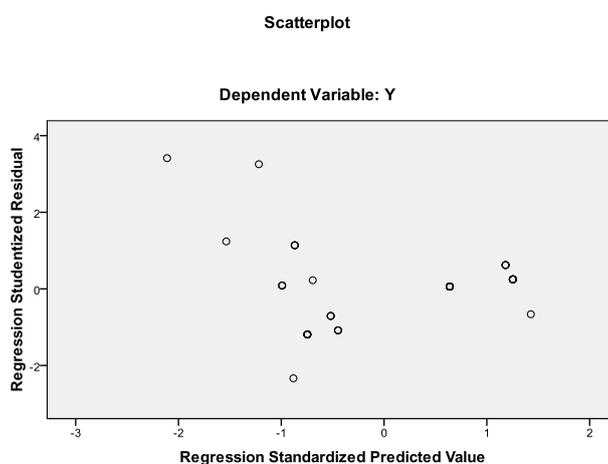
Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* berada dibawah atau $< 0,10$ dan nilai VIF diatas atau > 10 . Jadi disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *scatterplot* yang diperoleh dengan bantuan *software* SPSS versi 17.0. Menurut Ghozali (2002) heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik (*point-point*) membentuk pola tertentu seperti pola bergelombang, melebar kemudian menyempit. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik maka terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel, yaitu kejelasan sasaran anggaran (X1), pengendalian akuntansi (X2) dan sistem pelaporan (X3) sebagai variabel independen dan akuntabilitas kinerja pemda (Y) sebagai variabel dependen.

Tabel 4.10
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.699	1.161		-.602	.551
X1	.557	.034	.658	16.397	.000
X2	.538	.099	.358	5.407	.000
X3	-.219	.149	-.109	1.467	.151

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = -0.699 + 0.557 X1 + 0.538 X2 - 0.219 X3 + 1.161$$

4.5 Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Ho1 = Tidak terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Ha1 = Terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil pengolahan data, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.00 < 0.05$.

Selain itu, diperoleh t_{hitung} sebesar 16.397 dan t_{tabel} sebesar 2.021. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H1 diterima. Artinya, kejelasan sasaran anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan mengurangi senjangan anggaran pemerintah daerah.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan membuat ketidakpuasan dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Anjarwati (2012) dan Indudewi (2008) yang mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Ho2 = Tidak terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Ha2 = Terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil pengolahan data, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.00 < 0.05$.

Selain itu, diperoleh t_{hitung} sebesar 5.407 dan t_{tabel} sebesar 2.021. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H2 diterima. Artinya, sistem pengendalian akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Hansen dan Mowen (2004) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengendalian diperlukan untuk menjaga suatu organisasi agar bisa mencapai tujuannya dengan baik. Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reliabilitas data keuangan.

Ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan Indudewi (2008).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Herawaty (2011) dan Indudewi (2008) yang menemukan adanya pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

c. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Ho3 = Tidak terdapat pengaruh sistem pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Ha3 = Terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil pengolahan data, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.151. Nilai ini tidak signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.15 > 0.05$.

Selain itu, diperoleh t_{hitung} sebesar 1.467 dan t_{tabel} sebesar 2.021. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H3 ditolak. Artinya, sistem pelaporan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kondisi di mana pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang tersedia untuk mengembangkan akuntabilitas kerjanya menjadi lebih baik lagi. Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Anthony et. Al. (1989) dalam Indudewi (2008) mengungkapkan karakteristik sistem pelaporan yang baik sebagai berikut:

- a) Laporan merinci varian-varian prestasi aktual berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dari unit organisasi.
- b) Laporan ini mencakup ramalan tahunan.
- c) Laporan ini mencantumkan penjelasan mengenai, yaitu penyebab variansi (penyimpangan), tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan, dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi/perbaikan bisa efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Wulandari (2009) yang tidak menunjukkan adanya pengaruh sistem pelaporan terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

4.6 Uji Simultan (F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002). Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji pengaruh simultan:

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	387.685	3	129.228	343.047	.000 ^a
	Residual	14.315	38	.377		
	Total	402.000	41			

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

Uji pengaruh simultan ini dapat dilihat dari *p-value significant*. Nilai *p-value significant* sebesar 0.000, yaitu signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 yang berarti variabel-variabel independen dapat digunakan dalam memprediksi variabel dependennya.

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi (Ghozali, 2002). Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari koefisien determinasi:

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.964	.962	.614	2.154

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2013)

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan bagaimana model yang dibentuk dengan variabel-variabel independen dimasukkan secara bersamaan, dapat menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Adjusted R square* sebesar 0,964 yang berarti variabilitas variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dapat dijelaskan oleh variabilitas independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan adalah sebesar 96.4%. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 3.6% akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan model regresi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan.
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan.
4. Berdasarkan nilai koefisien determinasi atau *Rsquare* sebesar 0,964 hal ini menunjukkan bahwa 96.4% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Sedangkan untuk sisanya sebesar 3.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar lebih meningkatkan sistem pelaporan agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lebih baik lagi.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan dengan menerapkan pengendalian akuntansi yang ketat seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran dan pelaporannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. 2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Anjarwati, Mei. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Antony, R.N., Dearden, dan Bedford. 1996. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi V. Erlangga, Jakarta.
- Azlina, Nur & Reynaldi Riantiarno. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Pekbis Jurnal*, Vol.13, No.3.
- Darma, E. S. 2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah". *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen dan Mowen. 2004. *Akuntansi Manajemen*. Edisi ketujuh. Salemba Empat, Jakarta.
- Herawaty, Netty. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Daerah Kota Jambi". *Simposium Nasional Akuntansi Vol.13*. Jambi.
- Indudewi, Dian. 2008. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Universitas Semarang.
- Inpres No. 7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng". *Tesis*. Program Pasca Sarjana: UNDIP.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Permen dalam Negeri No.34 Tahun 2011 Pasal 1 Butir 4
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sasongko, Catur; Safrida Rumondang, 2010. *Anggaran*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Siaran Pers. 2011. *LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan*. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2006. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi". SNA 9 Padang.